

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENINGPADA KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TAHUN 2016**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**ERVIN DELA DWIYANTO**

**B 200154007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA  
TAHUN 2016**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**ERVIN DELA DWIYANTO**

**B 200 154 007**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Drs. Atwal Arifin, Ak.M.Si**  
**NIDN. 609016002**

## HALAMAN PENGESAHAN

# **PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* PADA KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TAHUN 2016**

Yang ditulis oleh:

**ERVIN DELA DWIYANTO**

**B200154007**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 7 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Drs. Atwal Arifin Ak.,M.Si

(Ketua Dewan Penguji)

2. DR. Erma Setyawati,M.M.,Akt

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Triyono, SE.,M.Si

(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
Dr. Mansudin, M.M  
NIDN. 0017025701

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara lisan diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbeneran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Februari 2019

Penulis



**ERVIN DELA DWIYANTO**

# **PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TAHUN 2016**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Obyek dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di pulau Jawa, dengan jumlah sampel 97 kabupaten dan kota. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diperoleh dari realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kabupaten dan kota se Jawa Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

**Kata kunci:** Belanja Modal (BM), Kinerja Keuangan Daerah (KKD), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## **Abstract**

The research aims to analyze the influence of Capital Expenditure for financial performance growth through revenue affluent as intervening variables. The sampling technique in this study is to use the purposive sampling method. The object of this research is all districts and cities in Java, with a sample of 97 districts and cities. The data used is a type of secondary data, which was obtained from the realization of the 2016 District and City Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Java. The results of this study indicate that Capital Expenditures have an influence on Local Government Financial Performance through Local Government Revenue, and Capital Expenditures have an influence on Local Government Financial Performance with Local Governance revenue as an intervening variable.

**Keywords:** Capital Expenditures, Local Government Financial Performance, Local Government Revenue

## **1. PENDAHULUAN**

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001, paradigma keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini pada hakekatnya akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola segala potensi kekayaan yang dimiliki daerahnya, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya yang lain dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menggali semua kemampuan keuangan daerah, maka dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah atau perusahaan dalam mempertahankan keberhasilannya atau meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya.

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja dikatakan terlaksana baik atau buruk dapat dilihat dari pencapaian kinerjanya. Kinerjanya dikatakan baik apabila pencapaian kinerja tersebut sesuai apa yang direncanakan dan sesuai dengan apa yang menjadi target sejak awal. Kinerja tersebut di katakan sangat baik apabila pencapaian kinerjanya dapat melebihi target yang direncanakan sejak awal. Begitu juga sebaliknya, kinerja dikatakan buruk apabila pencapaian kinerjanya tidak sesuai dengan target atau kurang dari target yang direncanakan sejak awal. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Mardiasmo (2009: 121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998).

Belanja modal merupakan angka yang memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya dan ini dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Peran proses penganggaran pengalokasian belanja modal ini menjadi hal yang sangat penting dan signifikan karena sangat penting dalam mendukung proses pembangunan daerah. Dengan adanya penganggaran pengalokasian belanja modal, maka mau tak mau pemerintah daerah harus menyentuh langsung peningkatan pembangunan berbagai infrastruktur yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyatnya. Adanya infrastruktur yang baik juga dapat mengundang investor untuk berinvestasi atau membuka usaha di daerahnya yang hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, sehingga mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan, menggali, dan memanfaatkan komponen-komponen sumber pendapatan daerah tersebut secara penuh sesuai apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan daerahnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

## **2. METODE**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Jawa dengan periode pengamatan tahun 2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, karena Purposive dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa yang melaporkan secara lengkap dalam Realisasi APBD pada tahun anggaran 2016.

## **2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **2.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah. James B. Whittaker (1995) dalam Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat Manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian.

### **2.1.2 Variabel Independen**

#### **1) Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

### **2.1.3 Variabel *Intervening***

#### **1) Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



## 2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Data sekunder dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa dengan periode pengamatan tahun 2016, yang diperoleh melalui Badan Pengawas Keuangan (BPK).

## 2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear. Jalur path analysis ini untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen secara simultan. Dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$PAD = p1 \text{ BM} + e1$$

$$PKK = p1 \text{ BM} + p2 \text{ PAD} + e2$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PKK = Pertumbuhan Kinerja Keuangan

p1, p2 = Koefisien Jalur

e1, e2 = Variabel Residu

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji Asumsi Klasik

#### 3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Belanja Modal	0,476	0,977	Data berdistribusi normal
PAD	0,484	0,973	Data berdistribusi normal
KKD	1,179	0,124	Data berdistribusi normal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Belanja Modal sebesar 0,977, PAD sebesar 0,973, dan KKD sebesar 0,124. Nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model regresi terdistribusi normal.

### 3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Belanja Modal	1,000	1,000	Tidak Terjadi Multikolineritas
PAD	0,794	1,259	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Hasil transformasi data yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan bahwa data tidak terkena multikolinearitas karena semua variabel independen memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ .

### 3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Belanja Modal	0,752	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Hasil Uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam tabel IV.6 menunjukkan nilai absolut residual dari semua variabel independen kedua model tersebut memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

### 3.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Kriteria	Durbin-Watson	Kesimpulan
1	$-2 < DW < 2$	2,00	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Hasil uji autokorelasi yang disajikan pada tabel IV.5 diperoleh nilai Durbin Watson pada model regresi I sebesar 2,002 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson model regresi I berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

### 3.2 Uji Hipotesis

#### 3.2.1 Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Model Regresi	Koefisien Reg Tak Terstandar		
	Constanta	BM	PAD
1	13,958	0,464	-
2	-0,856	-0,125	0,167

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

a. Persamaan Regresi I

$$\text{PAD} = 13,958 + 0,464 \text{ BM} + e$$

b. Persamaan Regresi II

$$\text{KKD} = -0,856 - 0,125 \text{ BM} + 0,167 \text{ PAD} + e$$

#### 3.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan Tabel IV.6 hasil dari uji F dalam model regresi yang pertama diperoleh F hitung sebesar 24,618 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan untuk hasil uji F model regresi yang kedua diperoleh nilai F hitung sebesar 68,284 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

#### 3.2.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	Regresi	R Square
1	BM $\rightarrow$ PAD	0,206
2	BM, PAD $\rightarrow$ KKD	0,592

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa :

1. Dalam model regresi pertama, 20,6% variabel PAD dijelaskan oleh Belanja Modal sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar metode penelitian.

2. Dalam model regresi kedua, 59,2% variabel Kinerja Keuangan Daerah dijelaskan oleh variabel Belanja Modal sedangkan sisanya yaitu sebesar 40,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar metode penelitian.

#### 3.2.4 Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficient B	t <sub>hitung</sub>	Signifikan	Keterangan
Belanja Modal	0,464	4,962	0,000	H1 diterima
PAD	0,167	11,170	0,000	H1 diterima

Sumber: Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa:

##### a. Hasil Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.8 diketahui bahwa Belanja Modal mempunyai thitung sebesar 4,962 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh dan secara statistic signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka H1 diterima.

##### b. Hasil Hipotesis Kedua

Pengujian Hipotesis kedua ini untuk menguji efek mediasi dari variabel PAD terhadap hubungan belanja modal dengan kinerja keuangan daerah, untuk mengetahui efek mediasi tersebut, akan dihitung pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh koefisien langsung dapat dilihat dari koefisien beta masing-masing model regresi. Pengaruh tidak langsung belanja modal dengan kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

-Koefisien Beta Belanja Modal terhadap PAD = 0,464

-Koefisien Beta PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah = 0,167

Jadi pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat dihitung sebagai berikut ;

$$\text{Pengaruh tidak langsung} = 0,464 \times 0,167 = 0,077$$

Oleh karena itu pengaruh tidak langsung sebesar 0,077 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar -0,601. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah, maka H2 diterima.

### **3.3 Pembahasan**

#### **3.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Adapun hasil pengujian t dari variabel Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah -8,128 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan daerah, yang artinya H1 diterima. Selain itu original sample sebesar -0,125 menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila belanja modal suatu daerah rendah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah naik. Hasil ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) mengenai Pengaruh pengeluaran modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung.

#### **3.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening**

Pengaruh koefisien langsung dapat dilihat dari koefisien beta masing-masing model regresi. Pengaruh langsung belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah sebesar -0,125. Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat dihitung dari Koefisien Beta Belanja Modal terhadap PAD  $\times$  Koefisien Beta PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah yaitu sebesar  $0,464 \times 0,167 = 0,077$ . Oleh karena itu pengaruh tidak langsung sebesar 0,077 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar -0,125. Dapat disimpulkan bahwa PAD memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho dan Fajar (2012) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

### **4. PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan

Asli Daerah sebagai variabel intervening.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Chow, C. W., Ganulin, D., Haddad, K. And Williamson, J. 1998. *The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management*. Journal of Health-care Management.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Fajar, & Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Diponegoro Jurnal Of Accounting. 1 (2): 1-14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pedoman penyusunan APBD tahun 2005*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sularso, Havid. , Restianto, Yanuar E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Ekonomi. Purwokerto.